



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 167 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SOREANG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 123 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 nomor 53);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan

- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 11 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 167

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 167 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN SOREANG KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SOREANG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

Pemerintah
Kabupaten Bandung



BUPATI BANDUNG PERATURAN



PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025



KECAMATAN SOREANG
KABUPATEN BANDUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Soreang Tahun 2025 Sejalan dengan proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Menindaklanjuti hasil penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di dalam, perlu disusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2025. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan mengacu pada arahan sebagai berikut :

1. Berpedoman kepada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, serta Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 mengatur tentang perubahan kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Peraturan ini terkait dengan hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 dan evaluasi

hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2024) dan Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025;

3. Mempedomani Perubahan RKPD Tahun 2025 serta mengacu terhadap sasaran dan prioritas pembangunan daerah, dan program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator, target kinerja dan pagu indikatif;
4. Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah (Pasal 16 Ayat (2) Permendagri No 86 Tahun 2017):
 - i. Persiapan Penyusunan,
 - ii. Penyusunan Rancangan,
 - iii. Perumusan Rancangan Akhir,
 - iv. dan Penetapan;
5. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 dan disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - i) Pendahuluan,
 - ii) Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, i
 - iii) Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah,
 - iv) Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, dan
 - v) Penutup; dan

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Soreang tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai pedoman bagi Kecamatan Soreang dalam melaksanakan secara akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin keberhasilan program dan kegiatan serta ketercapaian terhadap indikator kinerja utama yang tentunya harus mempunyai dampak (impact) yang dapat dirasakan oleh warga masyarakat Kecamatan Soreang melalui program dan kegiatan dalam Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pelayanan Publiknya.

Demikian agar menjadi perhatian, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta

partisipasi aktif dalam penyusunan Rencana Kerja Awal Kecamatan Soreang
Kabupaten Bandung Tahun 2025

Soreang, 24 Juni 2025



CAMAT SOREANG

Drs. HARIS TAUPIK

Nip. 19700605 19901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iv

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum..... 4

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Mekanisme Penyusunan..... 8

BAB II 12

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN SOREANG TAHUN LALU 12

2.1 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Soreang Tahun Berjalan12

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Soreang39

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah52

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD63

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat82

BAB III 84

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SOREANG 84

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....84

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....89

3.3 Program dan Kegiatan116

BAB IV 135

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 135

4.1 Rencana Kerja135

4.2 Pendanaan137

BAB V 156

PENUTUP 156

5.1 Catatan Penting.....156

5.2 Kaidah Pelaksanaan.....156

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan perencanaan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Rencana Strategis) Perangkat Daerah yang menggambarkan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Kecamatan Soreang dalam hal ini sebagai Perangkat Daerah yang difokuskan sebagai penyelenggaran urusan penyelenggara pelayanan publik dimana system penyelenggaraan pemerintahannya memprioritaskan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum kewilayahan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bandung nomor 137/Kep.862-TAPEM.2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Perencanaan adalah kunci dalam keberhasilan dimana E-planning, E-begetting dan E-Actuating pembangunan sangatlah diperlukan guna memastikan target pembangunan beserta tahapan-tahapan dalam mencapai target menjadi lebih terarah. Perencanaan pembangunan memiliki peran utama dalam mengarahkan pembangunan menuju target yang telah ditetapkan secara efektif melalui pengalokasian

sumber daya yang efisien. Sesuai dengan apa yang telah di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, rencana Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Kalsifikasi, Kode Fikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan sebagai penyelaras pembangunan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pemerintah Pusat mengatur dan menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan bersinergi antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan, terhadap kemajuan pembangunan wilayah. Dalam undang-undang tersebut, perencanaan pembangunan di level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, baik untuk perencanaan jangka panjang, menengah, maupun tahunan,

dilaksanakan dan diatur dalam satu koridor dengan kesatuan tata cara perencanaan, sehingga sinkronisasi antar perencanaan pembangunan dapat terwujud.

Sejalan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 mengatur perencanaan pembangunan internal Kabupaten Bandung dalam satu Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD). Mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, pasal 11 ayat (3), salah satu rencana pembangunan yang wajib disusun perangkat daerah yaitu rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka pendek satu tahun untuk menjaga sinergitas pembangunan antar waktu dan antar fungsi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, Pada pelaksanaa perencanaan pembangunan RPJMD mengacu kepada penetapan RPJMD 2021-2026 sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Awal Tahun 2025.

Untuk terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada tujuan (*goals*) dan juga berorientasi kepada proses, penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dengan menggunakan metode partisipatif, target pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bandung diharapkan lebih mencerminkan aspirasi seluruh kalangan yang tertampung dalam rencanan kerja SKPD. Dengan melalui pendekatan politis, penyusunan program pembangunan dilakukan sejalan dalam mendukung visi, misi, dan program kepala daerah yang dikonsultasikan dalam pembahasan dengan DPRD untuk menghasilkan produk hukum yang mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan. Sementara melalui pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, rencana pembangunan dalam RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bandung diselaraskan dalam mekanisme capaian kinerja dari Tahun 2023 sampai dengan tahun berjalan 2024 dan ditunjang dengan capaian mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari lingkup desa, kecamatan, hingga kabupaten, yang selanjutnya hasil kesepakatannya menjadi draf evaluasi usulan pada musrenbang provinsi dan nasional. Dalam pelaksanaannya, proses perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah untuk memungkinkan proses perencanaan menjadi lebih efisien. Melalui sistem tersebut, pengajuan usulan desa dan kecamatan beserta proses verifikasi dapat dilaksanakan dari jarak jauh dengan berbasis internet. Selain dari pada itu penggunaan aplikasi ini menjadikan perencanaan lebih transparan sebab memungkinkan pengawasan untuk dilakukan pada keseluruhan tahapan proses, sehingga hasil perencanaan dapat lebih akuntabel

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat (6) menyebutkan

bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan sebagian pelaksanaannya kepada camat untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja pemerintah kabupaten,

Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.862-TAPEM/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor ; 137.1/Kep.769-TAPEM/2023 Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan, terdapat 29 Bidang Pelimpahan, 23 sub bidang Pelimpahan, dan 321 Rincian Pelimpahan dengan Pelimpahan berupa Pelaksanaan, Koordinasi, Rekomendasi, Pembinaan, dan Fasilitasi (Perizinan dan Non Perizinan) dengan di prioritaskan menjadi 13 Program Strategis Kabupaten Bandung dan Tiga Program Prioritas Kabupaten Bandung.

Peyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Kecamatan Soreang Tahun 2025 disusun berdasarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Target yang akan dicapai dimana penyesuaian terhadap Dokumen Rencana Strategis penyelarasan dengan dokumen Perencanaan Kabupaten Bandung (RPJMD dan RKPDP) diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi dalam peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Soreang.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015-2019.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Perencanaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005-2025.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12)
13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.
 14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bandung.
 15. Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2025;
 16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung;
 17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 135 Tahun 2021 tentang Pedoman Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
 18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 87 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
 19. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
 20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 92);
 21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);
 22. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 53 Tahun 2024 tentang PeTentang raturan Bupati Bandung Nomor 123 Tahun 2022 Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 2024 Nomor 53);
 23. Keputusan Bupati Bandung Nomor Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.862-TAPEM/2023 tentang Perubahan Atas

Keputusan Bupati Bandung Nomor ; 137.1/Kep.769-TAPEM/2023
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk
Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Perubahan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 dimaksudkan untuk:

- a. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis
- b. Memastikan perencanaan, pemilihan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dalam pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, Renstra Perubahan, dan RKPD
- c. Sebagai tolok ukur dalam pencapaian strategi dan kebijakan umum pembangunan yang berkelanjutan di Kecamatan Soreang

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah :

- a. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan Tahun berjalan sebagai bahan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Soreang Tahun 2025
- b. Memberikan acuan bagi Kecamatan Soreang dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan bagi Kecamatan Soreang dalam menentukan lokasi kegiatan pada periode tahun berjalan dan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

- d. Memberikan acuan bagi Kecamatan Soreang dalam menyusun dan mengevaluasi indikator kinerja kegiatan periode tahun berjalan dan satu tahun yang akan datang.
- e. Memberikan acuan bagi Kecamatan Soreang dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4 Mekanisme Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Soreang, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perubahan Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen..

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Tahun Berjalan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perubahan Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap RKPD Tahun 2024 dan Tahun Berjalan

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Soreang

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perubahan Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan terkait Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Jumlah program dan jumlah kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu). Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan daerah yang dijabarkan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk diarahkan dalam pencapaian sasaran dan target pembangunan yang belum dapat dicapai.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN SOREANG
TAHUN LALU DAN TAHUN BERJALAN

2.1 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Soreang Tahun Lalu

Secara umum Perubahan Recana Kerja Kecamatan Soreang Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kecamatan Soreang Tahun 2021 - 2026. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan tahun berjalan , sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perubahan SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan - kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun – tahun mendatang.

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Soreang telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsinya, Pelaksanaan Renja Kecamatan Soreang Tahun 2024 dapat mencapai target secara kinerja maupun secara serapan anggaran. Kecamatan Soreang dengan anggaran

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		Tingkat Capaian (%)	PD
			K	RP	K	RO		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
7	UNSUR KEWILAYAHAN			6712742017		5.604.311.335	83,49%	
7,01	KECAMATAN			6,712,742,017		5,604,311,335		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akutanbilas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	76,56	5,774,771,752	80.60 Point	4,666,838,835	104.83 Point	Kec. Soreang
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen Perencanaan,	100 Persen	50,618,000	100 Persen	50,617,200	100	Kec. Soreang

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		Tingkat Capaian (%)	PD
			K	RP	K	RO		
		Penganggaran dan evaluasi,						
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16,996,000	2 Dokumen	16,996,000	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10,022,000	2 Dokumen	10,022,000	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	3,200,000	2 Dokumen	3,199,800	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,200,000	1 Dokumen	3,199,800	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,200,000	1 Dokumen	3,199,800	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7,800,000	1 Laporan	7,800,000	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6,200,000	1 Laporan	6,199,800	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan	100 Persen	5,070,874,824	100 Persen	3,991,828,296	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	241 Orang/bulan	5,067,674,824	241 Orang/bulan	3,988,628,696	100	Kec. Soreang

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		Tingkat Capaian (%)	PD
			K	RP	K	RO		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,200,000	1 Laporan	3,199,600	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0		0		Kec. Soreang
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0		0		Kec. Soreang
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0		0		Kec. Soreang
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian barang milik daerah dalam data base	100 Persen	3,200,000	100 Persen	3,199,800	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3,200,000	1 Laporan	3,199,800	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0		0		Kec. Soreang
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0		0		Kec. Soreang
7.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0		0		Kec. Soreang
7.01.01.2.03.03	Pengamanan Barang Milik Daerah			0		0		Kec. Soreang
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional Pelayanan Administrasi dan Umum Kantor	100 Persen	156,464,200	100 Persen	155,991,700	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5,130,000	15 Paket	5,129,400	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	50,000,000	10 Paket	49,824,800	100	Kec. Soreang

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		Tingkat Capaian (%)	PD
			K	RP	K	RO		
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	42 Paket	10,000,000	42 Paket	9,901,900	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			0		0		Kec. Soreang
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	10,000,000	5 Paket	9,999,600	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	4,914,000	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			0		0		Kec. Soreang
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	14,978,000	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	61,334,200	1 Laporan	61,244,000	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan operasional Pelayanan Administrasi dan Umum Kantor	100 Persen	0	100 Persen	0	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0	12 Unit	0	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	100 Persen	270,724,728	100 Persen	259,378,790	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	65,569,728	1 Laporan	55,845,030	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	203,155,000	4 Laporan	201,533,760	100	Kec. Soreang

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		Tingkat Capaian (%)	PD
			K	RP	K	RO		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	222,890,000	100 Persen	205,823,049	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	70,820,000	8 Unit	54,698,000	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2,070,000	12 Unit	2,070,000	100	Kec. Soreang
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,000,000	1 Unit	149,055,049	100	Kec. Soreang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi,	100	432,549,500	100 Persen	432,409,600	100.00 Persen	Kec. Soreang
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Persen	13,215,900	100 Persen	13,125,000	100	Kec. Soreang
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	13,215,900	1 Dokumen	13,125,000	100	Kec. Soreang
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	100 Persen	5,210,000	100 Persen	5,210,000	100	Kec. Soreang

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		Tingkat Capaian (%)	PD
			K	RP	K	RO		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5,210,000	1 Laporan	5,210,000	100	Kec. Soreang
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 Persen	21,428,000	100 Persen	21,379,200	100	Kec. Soreang
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	21,428,000	1 Dokumen	21,379,200	100	Kec. Soreang
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100 Persen	392,695,600	100 Persen	392,695,400	100	Kec. Soreang
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	392,695,600	1 Laporan	392,695,400	100	Kec. Soreang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100	258,677,000	100 Persen	258,668,000	100.00 Persen	Kec. Soreang
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase koordinasi pemberdayaan desa	100 Persen	164,625,000	100 Persen	164,622,000	100	Kec. Soreang
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	161,325,000	1 Laporan	161,322,000	100	Kec. Soreang
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga kemasyarakatan	3,300,000	4 Lembaga kemasyarakatan	3,300,000	100	Kec. Soreang
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga	Persentase capaian Lembaga	100 Persen	94,052,000	100 Persen	94,046,000	100	Kec. Soreang

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		Tingkat Capaian (%)	PD
			K	RP	K	RO		
	Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kemasyarakatan yang terfasilitasi						
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Dokumen	18,443,000	1 Dokumen	18,440,000	100	Kec. Soreang
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	55,446,000	4 Lembaga Kemasyarakatan	55,446,000	100	Kec. Soreang
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	20,163,000	1 Laporan	20,160,000	100	Kec. Soreang
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100	68,456,000	100 Persen	68,455,800	100.00 Persen	Kec. Soreang
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	53,456,000	100 Persen	53,455,800	100	Kec. Soreang
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	44,796,000	1 Laporan	44,796,000	100	Kec. Soreang
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	8,660,000	1 Laporan	8,659,800	100	Kec. Soreang
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan	100 Persen	15,000,000	100 Persen	15,000,000	100	Kec. Soreang

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		Tingkat Capaian (%)	PD
			K	RP	K	RO		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000	100	Kec. Soreang
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100	60,823,000	100	60,649,000	100.00	Kec. Soreang
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100 Persen	60,823,000	100 Persen	60,649,000	100	Kec. Soreang
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	7,520,000	50 Orang	7,520,000	100	Kec. Soreang
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40 Orang	19,733,000	40 Orang	19,559,000	100	Kec. Soreang
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	33,570,000	1 Dokumen	33,570,000	100	Kec. Soreang
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100	117,464,765	100 Persen	117,290,100	100.00 Persen	Kec. Soreang

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		Tingkat Capaian (%)	PD
			K	RP	K	RO		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			117,464,765		117,290,100		Kec. Soreang
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	19,901,600	100	Kec. Soreang
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	100	Kec. Soreang
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	47,464,765	1 Dokumen	47,388,500	100	Kec. Soreang

Urusan ini dilaksanakan oleh KECAMATAN SOREANG dengan anggaran sebesar Rp 6,712,742,017,- dan terealisasi sebesar Rp 5,604,311,335,- atau 83,49%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program yang terdiri dari 14 kegiatan yang terdiri dari 34 sub kegiatan yang di fokuskan pada 3 target sasaran utama

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi memiliki target yaitu 76,68 point pada Tahun Anggaran 2024, capaian berhasil terealisasi dengan hasil capaian 80,60 point.
2. Persentase BMD dalam kondisi baik memiliki target yaitu 98,00 % pada Tahun Anggaran 2024, capaian berhasil terealisasi dengan hasil capaian 98,75 %.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki target yaitu 90,07 point pada Tahun Anggaran 2024, capaian berhasil terealisasi dengan hasil

capaian 98,25 point.

- 4. Prosentase Adminstrasi Desa yang baik memiliki target yaitu 80,00 % pada Tahun Anggaran 2024, capaian berhasil terealisasi dengan hasil capaian 100,00%.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2022. Capaian IKU Kecamatan Soreang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Soreang Tahun 2024

No	MISI	TUJUAN	IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,07 Poin	98,75 Poin	Tercapai sebesar 105%

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Soreang adalah sebesar 91.75 Poin, capaian tersebut telah melebihi target dan tercapai sebesar 100.05%. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target Renstra Perubahan 2021-2026 pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Soreang adalah sebagai berikut

Tabel 2.2
Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Soreang Sampai dengan Tahun 2024 dan perbandingan dengan target Renstra Perubahan 2021 -2026

No	MISI	TUJUAN	IKU	Target Renstra Perubahan 2021-2026	Realisasi sampai dengan Tahun 2023	Persentase Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[3]	[4]	[5]
1	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,07 Poin	98,25 Poin	Tercapai sebesar 111,614%

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Soreang Sampai dengan Tahun 2023 sebesar 91,07 Poin Apabila dibandingkan dengan target Renstra Perubahan 2021-2026 sebesar 98,25 Poin, target tersebut telah tercapai sebesar 111,64 persen.

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dengan memperbandingkan capaian dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, Kecamatan Soreang telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Camat Soreang dengan Bupati Bandung. Hasil pengukuran atas kinerja ketercapaian sasaran strategis Kecamatan Soreang tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.3
Hasil pengukuran atas kinerja ketercapaian sasaran strategis Kecamatan Soreang tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	77,70 Poin	80,60 Poin	Tercapai sebesar 103%
		Persentase BMD dalam kondisi baik	98,25	98,50	Tercapai sebesar 100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98,03 Poin	98,25 Poin	Tercapai sebesar 100,07%
3	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Persentase Desa Beradministrasi baik	100 %	100 %	Tercapai sebesar 100%
Rata - Rata Capaian					100%

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja Kecamatan Soreang tahun 2023 sesuai

dengan target dan rata-rata capaian Kecamatan Soreang terhadap target sasaran strategis sebesar 100%. Perbandingan Antara Hasil pengukuran atas kinerja ketercapaian sasaran strategis Kecamatan Soreang tahun 2022 dan perbandingan dengan target Renstra Perubahan 2021-2026 menunjukkan hasil sebagai berikut

Tabel 2.4
Realisasi Sasaran Strategis Kecamatan Soreang Sampai dengan Tahun 2024 dan perbandingan dengan target Renstra Perubahan 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Renstra Perubahan 2021-2026	Realisasi sampai dengan Tahun 2024	Persentase Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	77.70 Poin	80,60, Poin	Tercapai sebesar 103 %
		Persentase BMD dalam kondisi baik	98,06%	98,25 %	Tercapai sebesar 100 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.00 Poin	98,75 Poin	Tercapai sebesar 110.%
3	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Persentase Desa Beradministrasi baik	100%	100%	Tercapai sebesar 100 %
Rata-Rata Persentase Capaian					100%

Realisasi Perjanjian Kinerja Kecamatan Soreang sampai dengan tahun 2023 dan Perbandingan dengan target Renstra Perubahan 2021-2026 adalah sebagai berikut.

2.1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Soreang sampai dengan tahun 2024 sebesar 80,60 Poin Apabila dibandingkan dengan Target Renstra Perubahan 2021-2026 sebesar 77,70 Poin, telah tercapai sebesar 103 persen terdapat kemajuan yang signifikan.

2.1.2 Persentase BMD dalam kondisi baik

Realisasi Persentase BMD dalam kondisi baik Kecamatan Soreang sampai dengan tahun 2024 sebesar 98,25 % Apabila dibandingkan dengan Target Renstra Perubahan 2021-2026 sebesar 98,06 %, telah tercapai sebesar 100 persen.

Dari seluruh realisasi diatas dapat disimpulkan bahwa Rata-Rata Persentase Realisasi Perjanjian Kinerja Kecamatan Soreang Sampai dengan Tahun 2024 dan perbandingan dengan target Renstra Perubahan 2021-2026 sebesar 100 %

2.1.3 Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki target yaitu 90,07 point

pada Tahun Anggaran 2024, capaian berhasil terealisasi dengan hasil capaian 98,25 point.

2.1.4 Prosentase Administrasi Desa yang baik memiliki target yaitu 80,00 % pada Tahun Anggaran 2024, capaian berhasil terealisasi dengan hasil capaian 100,00%.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, pelaksanaan kinerja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung ditunjang dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:

Tabel 2.5 (TC.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Soreang dan
Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Soreang s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)*
Kabupaten Bandung

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)=(7/6)	(9)		(10)	(11)=(5+7+10)		(12)=(11/4)
	KECAMATAN SOREANG																
7	UNSUR KEWILAYAHAN																
7.01	KECAMATAN																
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik	77.00	Poin	77,70	Poin	78,68	Poin	80,60	Poin	102%	76,75	Poin	76,75		Poin	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi,	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	-		Persen	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	1	5	Dokumen	2,50
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	1	5	Dokumen	2,50

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	1	5	Dokumen	2,50
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	3	Dokumen	3,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	3	Dokumen	3,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	3	Laporan	3,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	3	Laporan	3,00
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen		0	Dokumen	0	0	Dokumen	-
7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	Data	0	Data	0	Data	0	Data		0	Data	0	0	Data	-
															0		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100		Persen	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen			Persen	-
7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit		0	Unit	0	0	Unit	1,00
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket		0	Paket	1	1	Paket	1,00
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen		0	Dokumen	1	1	Dokumen	1,00
7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	0	2	Dokumen	2,00
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	50	Orang	50	Orang	50	Orang	100%	50	Orang	0	100	Orang	2,00
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang		0	Orang	0	0	Orang	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional Pelayanan Administrasi dan Umum Kantor	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100 Persen	0	Persen	-
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	100%	5	Paket	5	15	Paket	3,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	100%	10	Paket	10	30	Paket	3,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	100%	5	Paket	5	15	Paket	3,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	100%	5	Paket	5	15	Paket	3,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	100%	5	Paket	5	15	Paket	3,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	Dokumen		0 Dokumen	Dokumen	0	0	Dokumen	-
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	0	2	Laporan	2,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	0	2	Laporan	2,00
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen		0	Dokumen	0	0	Dokumen	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen		0	Dokumen	0	0	Dokumen	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen		0	Persen	0	0	Persen	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit		0	Unit	0	0	Unit	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100		Persen	-
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	3	Laporan	3,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	3	Laporan	3,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	3	Laporan	3,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100		Persen	-
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	Unit	9	Unit	9	Unit	9	Unit	100%	9	Unit	9	27	Unit	3,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	100%	5	Unit	5	15	Unit	3,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	1	3	Unit	3,00
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	1	3	Unit	3,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75	Poin	81,75	Poin	81,75	Poin	81,75	Poin	100%	81,75	Poin	0	0	Poin	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	0	0	Persen	-
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	0	2	Laporan	2,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	0	2	Dokumen	2,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen			Persen	-

[illegible]

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,25	Poin	81,25	Poin	81,500	Poin	81,75	Poin	100%	82,00	Poin	0	163	Poin	2,01
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Prosentase Capaian keberhasilan peningkatan pemberdayaan desa</i>	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	0	200	Persen	2,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	4	Lembaga Kemasyara katan	4	Lembaga Kemasyara katan	4	Lembaga Kemasyara katan	4	Lembaga Kemasyara katan	100%	4	Lembaga Kemasyara katan	4	12	Lembaga Kemasyara katan	3,00
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	3	Dokumen	3,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	3	Laporan	3,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase capaian Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi</i>	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	0	200	Persen	2,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyara katan	1	Lembaga Kemasyara katan	1	Lembaga Kemasyara katan	1	Lembaga Kemasyara katan	100%	1	Lembaga Kemasyara katan	1	3	Lembaga Kemasyara katan	3,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	3	Laporan	3,00
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	3	Laporan	3,00
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lcapaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen		0	Persen		0	Persen	
7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga		0	Keluarga	0	0	Keluarga	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga		0	Keluarga	0	0	Keluarga	
7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga		0	Keluarga	0	0	Keluarga	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah</i>	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga		0	Keluarga	0	0	Keluarga	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</i>	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga		0	Keluarga	0	0	Keluarga	
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</i>	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga		0	Keluarga	0	0	Keluarga	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	0		Persen	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	0		Persen	-
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	3	Laporan	3,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	3	Laporan	3,00
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	0	200	Persen	2,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	3	Laporan	3,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,5	Poin	81,5	Poin	81,5	Poin	81,5	Poin	100%	81,5	Poin	0	163	Poin	2,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	0	200	Persen	2,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	Orang	50	Orang	50	Orang	50	Orang	100%	50	Orang	50	150	Orang	3,00
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50	Orang	50	Orang	50	Orang	50	Orang	100%	50	Orang	0	100	Orang	2,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	50	Orang	50	Orang	50	Orang	100%	50	Orang	0	100	Orang	2,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	3	Dokumen	3,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa cepat berkembang / Persentase desa yang dibina dan diawasi	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	0 %	200	Persen	2,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	0	200	Persen	2,00
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	0	2	Dokumen	2,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	3	Dokumen	3,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0%	1	Dokumen	0	2	Dokumen	2,00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	0	2	Dokumen	2,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	0	2	Dokumen	2,00
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	#DIV/0!	0	Laporan	0	0	Laporan	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Soreang

Kecamatan Soreang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Adapun rincian tugas pokok Kecamatan Soreang yaitu memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Soreang.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan Soreang dituntut untuk melaksanakan fungsi yang sekaligus menjadi pelayanan perangkat daerah kewilayahan yaitu:

- a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasikan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
- b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
- c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

Selain 4 (empat) fungsi tersebut, Kecamatan Soreang melaksanakan pelimpahan kewenangan dari Bupati Bandung untuk

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan Soreang. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.862-TAPEM/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor ; 137.1/Kep.769-TAPEM/2023 Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan.

Tabel 2.6
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan
dari Bupati Kepada Camat

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
STATISTIK	Fasilitasi	Fasilitasi pemberian dukungan penyelenggaraan survey antar sensus kecamatan
SOSIAL	Fasilitasi	Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan bagi anak terlantar
		Memfasilitasi pendataan dan pemantauan keberadaan anak terlantar
		Memfasilitasi penyuluhan sosial dan pencegahan anak terlantar
	Koordinasi	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bagi wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan / trafficking dan keluarga migran
	Rekomendasi	Memberikan rekomendasi kepada Organisasi Sosial / Panti Sosial yang berada di Desa / Kelurahan dalam hal pendaftaran baru / ulang
PERTANIAN	Fasilitasi	Fasilitasi pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di Kecamatan
	Koordinasi	Koordinasi pencegahan penyakit menular di Kecamatan
	Penyelenggaraan	Identifikasi cadangan pangan dan makanan pokok masyarakat tingkat Kecamatan

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
PERTANAHAN	Fasilitasi	Fasilitasi penetapan tanah ulayat
		Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
		Fasilitasi perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten di Kecamatan
	Koordinasi	Koordinasi penyelesaian masalah tanah kosong
		Koordinasi aspek sosial kemasyarakatan dalam proses izin lokasi
		Koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan
		Koordinasi penyelesaian masalah tanah ulayat melalui musyawarah di Kecamatan
	Pengendalian	Monitoring terhadap pelaksanaan izin lokasi
PERTAMBANGAN	Fasilitasi	Fasilitasi pengembangan peran serta masyarakat dalam konservasi air bawah tanah
		Fasilitasi pengendalian pengelolaan air bawah tanah dan konservasi air bawah tanah sesuai dengan kebijakan daerah
PERPUSTAKAAN	Fasilitasi	Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di desa / kelurahan / pontren
PERINDUSTRIAN	Fasilitasi	Fasilitas pengembangan usaha industri kecil, tradisional dan rumah tangga
PERHUBUNGAN	Koordinasi	Perencanaan pemasangan, pemeliharaan kebersihan, serta pemantauan keamanan aset perlengkapan jalan di Desa
PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Koordinasi	Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah skala Kecamatan
	Pengendalian	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Desa dan antara Kecamatan/Desa dengan swasta dalam skala Kabupaten
		Pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan daerah skala kecamatan dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa serta penyusunan perumusan DSP Kecamatan

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
	Penyelenggaraan	Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kecamatan
		Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Kecamatan
PENDIDIKAN	Fasilitasi	Memfasilitasi pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
		Memfasilitasi pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dasar
		Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan
		Memfasilitasi perencanaan, penetapan, dan pendirian dan penutupan TK, SD, SMP serta Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
	Koordinasi	Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan TK/SD dan SMP
	Pengendalian	Pengenalan dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini
	Rekomendasi	Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD, dan SMP
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Koordinasi	Koordinasi dan fasilitasi kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender
		Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap kekerasan tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, serta perempuan di tingkat Kecamatan
		Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak
	Penyelenggaraan	Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) tingkat Kecamatan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Fasilitasi	Fasilitasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes), Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Desa, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (ILLPDes)
		Fasilitasi pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan ke Desa

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
		Fasilitasi pendataan profil Desa
		Fasilitasi pengawasan dan penanggulangan masalah-masalah penyelenggaraan pembangunan Desa
		Fasilitasi pengembangan BUMDES
		Fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin
		Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat
		Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat
		Memfasilitasi pengusulan mutasi, rotasi perangkat desa di Kecamatan
		Memfasilitasi pengusulan penghargaan untuk perangkat desa di Kecamatan
	Koordinasi	Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
		Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat budaya
		Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG)
		Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan
		Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan
		Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan
		Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan
		Mengkoordinasikan terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan, peningkatan perekonomian dan pembangunan, serta pelayanan

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
		kepada masyarakat dalam wilayah Kecamatan
	Pembinaan	Pembinaan dan supervisi pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
		Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan
		Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya
		Supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG)
	Pembinaan dan Pengawasan	Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
		Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
		Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegakan batas Desa
		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
		Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
		Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
		Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya
	Penetapan	Cuti Kepala Desa
		Pengangkatan dan Pemberhentian BPD
	Pengawasan	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan masyarakat di Kecamatan

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan lembaga adat dan budaya
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan
		Monitoring, evaluasi serta pelaporan dan pengolahan data profil desa dan kelurahan
		Monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan
	Penyelenggaraan	Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan
		Penyelenggaraan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
		Penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian pejabat Kepala Desa
		Penyelenggaraan pengesahan, pelantikan, dan pengambilan sumpah keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
		Penyelenggaraan pengesahan, pelantikan, dan pengambilan sumpah Kepala Desa hasil pemilihan
		Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat
	Rekomendasi	Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi pencegahan bencana
		Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
		Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemebentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan
		Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan
		Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar Desa
		Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan di Desa

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
		Memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan pencairan keuangan desa
		Memberikan rekomendasi perangkat desa
PEKERJAAN UMUM	Fasilitasi	Fasilitasi perencanaan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten di wilayah Kecamatan
	Koordinasi	Koordinasi penanganan irigasi antar Kecamatan dalam kegiatan pengairan
		Mengkoordinasikan penanganan bencana alam tingkat kecamatan
		Mengkoordinasikan penanganan jaringan irigasi dalam wilayah Kecamatan
	Rekomendasi	Merekomendasikan pembentukan kelembagaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)
PARIWISATA	Fasilitasi	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya pariwisata
		Fasilitasi pelaksanaan pasanggiri mojang jajaka tingkat Kecamatan
		Fasilitasi pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata
		Fasilitasi penyelenggaraan promosi pariwisata skala Kecamatan
		Fasilitasi penyelenggaraan widya wisata skala kecamatan serta mengirim dan menerima peserta group widya wisata
		Fasilitasi sapta pesona, promosi dan sosialisasi potensi Daya Tarik Wisata (DTW)
	Pembinaan	Pemberdayaan masyarakat pelaku jasa usaha pariwisata
LINGKUNGAN HIDUP	Fasilitasi	Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
		Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
		Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup
	Koordinasi	Koordinasi dan pelaksanaan pelestrasian keanekaragaman hayati
		Koordinasi pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
		pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala Kecamatan
		Koordinasi pengawasan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kecamatan
		Koordinasi pengawasan kondisi lahan dan/atau tanah skala kecamatan
		Memantau dan membina masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPST
		Mengarahkan masyarakat dalam hal pengangkutan sampah dari sumber Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
		Mengkoordinasikan pengelolaan sampah di masyarakat tingkat kecamatan
		Pengadaan lahan dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
		Pengadaan roda sampah dan tempat sampah terpilah
		Penyebaran informasi tentang sampah kepada masyarakat
	Pengumpulan Data dan Informasi	Melaksanakan Inventarisasi kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan skala Kecamatan
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAN	Penyelenggaraan	Penyelenggaraan pencatatan dan pendataan koperasi UMKM di Kecamatan
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Koordinasi	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan forum komunikasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan kelompok komunikasi sosial
		Koordinasi dan fasilitasi sinergitas kelompok / organisasi yang bergerak di bidang informasi sebagai upaya penyelarasan media dengan program pembangunan di Kecamatan
KETAHANAN PANGAN	Fasilitasi	Fasilitasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan tingkat Kecamatan
	Koordinasi	Koordinasi mengidentifikasi kelompok rawan pangan

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
		Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan makanan
		Koordinasi pemantauan terhadap cadangan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan masyarakat
KESEHATAN	Koordinasi	Mengkoordinasikan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah
		Mengkoordinasikan pencegahan gizi buruk
		Mengkoordinasikan upaya penurunan jumlah kematian Ibu, jumlah kematian bayi dan jumlah kematian balita
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Koordinasi	Pengendalian Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat di bidang fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada
	Pembinaan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat (Bimbingan, pemantauan, dan evaluasi) di Bidang ketahanan Ideologi Negara, Bela Negara, dan memfasilitasi usulan penghargaan kebangsaan
		Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat (Koordinasi, bimbingan, konsultasi) di bidang bina masyarakat, tenaga kerja, dan penanganan konflik sosial
		Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat (koordinasi, konsultasi, pemantauan) dan fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada
		Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat berupa koordinasi di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
		Pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat berupa koordinasi di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
	Pengawasan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, nilai-nilai sejarah dan kebangsaan serta usulan penghargaan.
	Pengendalian	Pengendalian penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat di bidang bina masyarakat, tenaga kerja, dan penanganan konflik sosial
	Penyelenggaraan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara dan usulan penghargaan kebangsaan
		Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Fasilitasi	Fasilitasi pencatatan sipil skala Kecamatan
	Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kecamatan
		Pengendalian penyelenggaraan pencatatan sipil lingkup Kecamatan
	Pengumpulan Data dan Informasi	Pengumpulan data kelahiran kematian tingkat Kecamatan
	Penyelenggaraan	Penyelenggaraan pelaporan pendaftaran penduduk
		Penyelenggaraan sosialisasi bimbingan teknis supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk
	Koordinasi	Koordinasi pelayanan pencatatan sipil lingkup Kecamatan
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Fasilitasi	Fasilitasi aktivitas kepemudaan di Kecamatan

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
		Fasilitasi Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda di Kecamatan
	Koordinasi	Koordinasi bidang kepemudaan di Kecamatan
	Pembinaan	Pembinaan dan koordinasi secara hirarkis pemerintahan di bidang kepemudaan
		Pembinaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di Kecamatan
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Koordinasi	Koordinasi pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak berupa
		Koordinasi pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi
		Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi Keluarga Berencana (KB) pria dalam pelaksanaan program pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi
		Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi menular Seksual (IMS)
		Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi
		Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan
KEHUTANAN	Koordinasi	Koordinasi inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam wilayah Kecamatan
		Koordinasi pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi. Hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta hutan taman raya
	Rekomendasi	Rekomendasi untuk izin pengelolaan sarang burung walet, lebah madu, dan budidaya jamur
KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan	Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME dan lembaga adat

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
		Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan budi pekerti bangsa
		Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan skala Kecamatan meliputi
	Rekomendasi	Rekomendasi pemberian penghargaan kepada seniman, budayawan yang telah berjasa kepada negara dan daerah
KEARSIPAN	Penyelenggaraan	Melaksanakan pelaporan arsip dinamis aktif dan inaktif setiap triwulan ke Kabupaten

Kecamatan Soreang pada periode Renstra Perubahan 2021 – 2026 melaksanakan 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama, 1 (Satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) Indikator sasaran strategis. IKU ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja pemerintahan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan untuk acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun target kinerja dalam Renja tahunan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung. Selanjutnya sebagai perwujudan transparansi kinerja Kecamatan Soreang telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan antara Camat Soreang dengan Bupati Bandung. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Soreang tersaji dalam tabel berikut ini

Tabel 2.7 TC-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Soreang
Kabupaten Bandung

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perubahan Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
				4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Indeks kepuasan masyarakat			81	81,25	81,50	81,75	83,03	98,25	98,70	98,75	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Soreang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Adapun rincian tugas pokok Kecamatan Soreang yaitu memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Soreang.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kecamatan Soreang dituntut untuk melaksanakan perencanaan kinerja yang efektif serta memastikan pencapaian tujuan Kecamatan Soreang melalui proses perencanaan serta monitoring dan evaluasi. Pada tabel T-C.30 telah dijelaskan pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah namun perlu digarisbawahi terdapat hal-hal kritis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang ditargetkan, yaitu sebagai berikut

2.3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Soreang Tahun 2024 sebesar 80,60 Poin Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 77,70 Poin, terjadi peningkatan atau tumbuh sebesar 1.14 persen

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja terhadap implementasi SAKIP Kecamatan Soreang dengan rincian sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

- ❖ Penyebab keberhasilan perencanaan kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen, yaitu
 - a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia,
 - b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)
 - c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- ❖ Penyebab kegagalan perencanaan kinerja, karena masih terdapat kelemahan yaitu
 - a. Dokumen perencanaan kinerja (Renstra Perubahan dan Renja) tidak / belum dipublikasikan tepat waktu,
 - b. Rencana aksi kinerja belum dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja belum sepenuhnya dipantau secara berkala.
- ❖ Solusi yang telah dilakukan yaitu

- a. Dokumen perencanaan kinerja (Renstra Perubahan dan Renja) telah dipublikasikan tepat waktu,
- b. Dokumen perencanaan kinerja harus ditetapkan dengan keputusan Bupati Bandung.
- c. Pemantauan atas capaian Rencana Aksi secara berkala telah berisi hambatan/alasan bila ada keselarasan antara target dan capaian, solusi/saran perbaikan.

B. Pengukuran Kinerja

- ❖ Penyebab keberhasilan pengukuran kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen, yaitu
 - a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan,
 - b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan,
 - c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien,
- ❖ Penyebab kegagalan pengukuran kinerja karena masih terdapat kelemahan yaitu
 - a. Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja,
 - b. Terdapat Definisi Operasional atas kinerja, namun cara mengukur indikator kinerja belum jelas.
 - c. Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja yang diharapkan
 - d. Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

- e. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja
- f. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
- ❖ Solusi yang telah dilakukan yaitu
 - a. Membuat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja,
 - b. Pada Definisi Operasional atas kinerja, telah dibuat formulasi penghitungan cara mengukur indikator kinerja dengan jelas.
 - c. Data kinerja yang dikumpulkan dari Kasi-kasi, Kasubag dan fungsional telah dilampirkan sebagai pendukung Laporan triwulan yang dibuat.
 - d. Pengumpulan data kinerja agar memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
 - e. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
 - f. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.

A. Pelaporan Kinerja

- ❖ Penyebab keberhasilan pelaporan kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen, yaitu
 - a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja,
 - b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja,

informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya,

c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya,

❖ Penyebab kegagalan pelaporan kinerja karena masih terdapat kelemahan yang meliputi:

a. Dokumen Laporan Kinerja belum direviu (belum ada cheklis reviu berjenjang),

b. Dokumen Laporan Kinerja belum dipublikasikan.

c. Dokumen Laporan Kinerja tidak menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya,

❖ Solusi yang telah dilakukan yaitu:

a. Dokumen Laporan Kinerja telah direviu secara berjenjang dibuktikan dengan form cheklis reviu berjenjang,

b. Dokumen Laporan Kinerja (LKIP) 2023 telah segera dipublikasikan melalui bandungkab.go.id.

c. Dokumen Laporan Kinerja untuk tahun 2023 telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya,

B. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

❖ Penyebab keberhasilan evaluasi akuntabilitas kinerja internal meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen, yaitu

a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan,

b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.

- c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja,
- ❖ Penyebab kegagalan evaluasi internal pencapaian kinerja program organisasi karena masih terdapat kelemahan yaitu
 - a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berjenjang,
 - b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
 - c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi),
 - d. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya ditindaklanjuti,
- ❖ Solusi yang telah dilakukan yaitu
 - a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah,
 - b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Internal di Lingkungan Kecamatan Soreang.
 - c. Melaksanakan koodinasi dengan Tim SAKIP Pemerintah Kabupaten Bandung terkait menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi),
 - d. menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya,

2.3.2 Persentase BMD dalam kondisi baik

Realisasi Persentase BMD dalam kondisi baik Kecamatan Soreang Tahun 2024 sebesar 98,50% Apabila dibandingkan dengan

realisasi Tahun 2024 sebesar 98,50%, terjadi peningkatan atau tumbuh sebesar 0.5 persen

Meskipun realisasi persentase BMD dalam kondisi baik pada tahun 2024 telah tercapai, Kecamatan Soreang tetap berkomitmen memegang prinsip akuntabilitas dalam seluruh pelaporan sebagai wujud implementasi transparansi informasi sebagai sarana evaluasi untuk perbaikan kedepannya. Sebagai upaya perbaikan berkelanjutan, pada tahun 2024 Pemerintah Kecamatan Soreang telah melaksanakan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan persentase BMD dalam kondisi baik. Langkah-langkah tersebut yaitu:

1. Menyelesaikan penertiban aset / BMD agar prosedur penghapusan barang dengan kondisi rusak secara bertahap dapat ditempuh. Proses ini akan selesai tahun 2024 yang diakhiri dengan sensus BMD secara keseluruhan.
2. Melaksanakan sensus BMD secara keseluruhan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pendataan aset sehingga pembenahan aset dapat terlaksana, dan juga output dari sensus BMD tersebut digunakan sebagai acuan dasar untuk proses rekonsiliasi aset daerah.
3. Pembentukan tim khusus untuk penyelesaian tertib administrasi dan penggunaan BMD dan penyelesaian reklasifikasi barang.

2.3.3 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Soreang Tahun 2024 sebesar 98.75 Poin Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 98.25 Poin, terjadi peningkatan atau tumbuh sebesar 0,25 persen

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada aplikasi e-skm, didapat data sebagai berikut:

a. Pelayanan Pembuatan e-KTP

Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Pembuatan e-KTP di Kecamatan Soreang Tahun 2023 adalah 82,7 (Baik) pada 9 unsur pelayanan, namun unsur yang harus mendapat perhatian dan perbaikan adalah unsur *Waktu Penyelesaian, Prosedur, Perilaku Pelaksana*.

b. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK)

Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2024 adalah 86,01 (Baik) pada 9 unsur pelayanan, namun terdapat unsur yang harus mendapat perhatian dan perbaikan adalah unsur *Waktu Penyelesaian, Perilaku Pelaksana, Prosedur*.

c. Pelayanan Pembuatan SKTM

Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Pembuatan SKTM Tahun 2024 adalah 86,24 (Baik) pada 9 unsur pelayanan, namun terdapat unsur yang harus mendapat perhatian atau perbaikan adalah unsur *Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana, Prosedur*.

d. Pelayanan Pembuatan Surat Pindah Datang

Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Pembuatan Surat Pindah Datang Tahun 2024 adalah 92,32 (Sangat Baik) pada 9 unsur pelayanan, namun terdapat unsur yang harus mendapat perhatian atau perbaikan adalah unsur *Prosedur, Waktu Pelayanan dan Perilaku Pelaksana*.

e. Pelayanan Pembuatan Keterangan Ahli Waris

Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Pembuatan Keterangan Ahli Waris Tahun 2022 adalah 85,42 (Baik) pada 9 unsur pelayanan, namun terdapat unsur yang harus mendapat perhatian atau perbaikan adalah unsur *Perilaku Pelaksana, Waktu Pelayanan dan Kompetensi Pelaksana*.

f. Pelayanan Surat Lainnya

Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Surat Lainnya Tahun 2023 adalah 100 (Sangat Baik) pada 9 unsur pelayanan, namun terdapat unsur yang harus mendapat perhatian atau perbaikan adalah unsur *Perilaku Pelaksana, Prosedur dan Waktu Pelayanan*.

g. Pelayanan Pembuatan Akta Tanah

Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Rekomendasi Pembuatan Akta Jual Beli adalah 79.17 (Baik). Adapun dari 9 unsur pelayanan, unsur yang harus mendapat perhatian adalah unsur Sarana dan *Prasarana, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur*.

h. Pelayanan Rekomendasi Bantuan Dana/Hibah

Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Rekomendasi Pencairan Bantuan Keuangan Desa Tahun 2023 adalah 80,56 (Baik). Adapun dari 9 unsur pelayanan, unsur yang harus mendapat perhatian adalah unsur *Sarana dan Prasarana, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur*.

i. Pelayanan Surat Keterangan Lainnya

Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Rekomendasi Pencairan Bantuan Keuangan Desa Tahun 2023 adalah 90,68 (Baik). Adapun dari 9 unsur pelayanan, unsur yang harus

mendapat perhatian adalah unsur *Sarana* dan *Prasarana, Persyaratan, Sistem, Mekanisme* dan *Prosedur*.

- ❖ Solusi yang telah dilakukan yaitu terus melakukan perbaikan berkelanjutan dari semua unsur pelayanan, diantaranya
 1. Penyesuaian SOP Pelayanan
 2. Efektifitas kinerja pelayanan
 3. Coaching dan Mentoring Sumber Daya Manusia
 4. Peningkatan kualitas dan efektifitas Sumber Daya Manusia dengan cara sosialisasi dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh internal Kecamatan dan Instansi Vertikal

2.3.4 Persentase Desa yang Beradministrasi baik

Realisasi Persentase Desa Beradministrasi baik Kecamatan Soreang Tahun 2024 sebesar 80% Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 70 %, dikarenakan nilai tersebut baru ditetapkan pada tahun 2023

Meskipun realisasi Persentase Desa yang Beradministrasi baik pada tahun 2024 telah tercapai, Kecamatan Soreang tetap berkomitmen memegang prinsip berAkhak sebagai sarana evaluasi untuk perbaikan kedepannya. Sebagai upaya perbaikan berkelanjutan, pada tahun 2024 Pemerintah Kecamatan Soreang telah melaksanakan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan Persentase Desa yang Beradministrasi baik, Penilaian terhadap seluruh aspek Administrasi Desa

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Soreang, maka ditentukan isu – isu penting yaitu:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap berdasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan Non Pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
2. Optimalisasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh – sungguh memperhatikan Company/Corporate Social Responsibility (CSR), maka Kecamatan harus benar benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pelayanan Prima. Kecamatan Soreang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bandung yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar – benar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta tatanan atau aturan yang berlaku. Dan penyelenggaraan prima tersebut diperlukan Standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat baik melalui kegiatan yang ada di tingkat desa maupun

kegiatan sosialisasi kependudukan yang secara intens dilaksanakan oleh Kecamatan pada tiap tahunnya. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan masyarakat dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat.

4. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
5. Fasilitasi Pemanfaatan posisi dan potensi sebagai wilayah Pariwisata, Perdagangan dan Pendidikan yang dimiliki oleh Kecamatan Soreang harus sebaik mungkin dapat dimanfaatkan guna mendorong kemajuan kesejahteraan masyarakatnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Definisi RKPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai dokumen rencana tahunan

daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan alasan sebagai berikut:

1. Arahkan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
2. Acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Isu – Isu Strategis

Dari Analisa isu strategis masih terdapat permasalahan isu pada

1. Penguatan fungsi wilayah
2. Peningkatan kualitas SDM.
3. Penanganan Stunting, Kemiskinan Ekstrem
4. Peningkatan Ekonomi Kewilayahan.

Dari analisis tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk menyelesaikan isu strategis yang diharapkan dapat menjadi basis perencanaan yang mendukung program mandatori kewilayahan pada tahun 2025 yaitu:

5. Penguatan fungsi wilayah sebagai wilayah penompang pertumbuhan perkembangan Pembangunan ibu kota Kabupaten Bandung.
6. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan layanan Pendidikan (terutama program penyetaraan Pendidikan) dan Pelatihan Ketenagakerjaan.
7. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan layanan kesehatan, layanan KB dan pengendalian penduduk.
8. Peningkatan kolaborasi unsur Pentahelix untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem
9. Pengembangan kegiatan budidaya pertanian/peternakan dan kegiatan pariwisata secara bijak.
10. Peningkatan infrastruktur wilayah sebagai pendukung pengembangan sektor wisata dan sektor pertanian.
11. Peningkatan jaringan kerjasama usaha pelaku ekonomi melalui kemitraan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi serta pelaku ekonomi lainnya.
12. Kolaborasi dengan Pentahelix untuk penanganan penurunan miskin ekstrem, stunting dan wilayah blank spot.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Kecamatan Soreang sesuai tugas dan fungsinya merencanakan pelaksanaan program kegiatan diantaranya

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebagai upaya dalam Penguatan fungsi wilayah untuk pelaksanaan
 - a. Forum Koordinasi Kecamatan Sehat (FKKS)
 - b. Fasilitasi kegiatan-kegiatan percepatan penurunan stunting
 - c. Fasilitasi pemberdayaan UMKM dan Koperasi

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagai upaya Kecamatan dalam beberapa hal, diantaranya
 - a. Upaya mengatasi masalah sarana dan prasarana khususnya dalam hal peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dalam sarana dan prasarana pelayanan umum sehingga dapat melaksanakan rekomendasi tersebut.
3. Kecamatan Soreang merencanakan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat diantaranya
 - a. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan dan fasilitasi perencanaan, penetapan, dan pendirian dan penutupan TK, SD, SMP serta Pendidikan Luar Sekolah (PLS) sebagai upaya peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan terutama program penyetaraan pendidikan.
 - b. Fasilitasi peningkatan layanan kesehatan, layanan KB dan pengendalian penduduk
 - c. Fasilitasi dan koordinasi sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrem sebagaimana Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Bidang Sosial
 - d. Fasilitasi Pengembangan kegiatan budidaya pertanian/peternakan dan kegiatan pariwisata secara bijak sebagaimana Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Bidang Pertanian dan Pariwisata
 - e. Kecamatan Soreang sebagaimana termuat pada pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Bidang Komunikasi Dan Informatika merencanakan dengan

Instansi Vertikal sebagai upaya penyelesaian wilayah blank spot di Kecamatan Soreang

4. Kecamatan Soreang pada Program Ketentraman dan Ketertiban sebagai upaya dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, dimana dalam peraturan tersebut menerangkan bahwa tahapan, kelengkapan dan bantuan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diantaranya Deteksi Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, Pengawalan, Penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Adapun rumusan terhadap rencana program dan kegiatan tahun 2025 sesuai dengan hasil analisis kebutuhan organisasi, dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel. TC 31
Review TerhadapRancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Bandung

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Soreang

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
KECAMATAN	Kecamatan Soreang				KECAMATAN	Kecamatan Soreang	KECAMATAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Soreang	Nilai SAKIP	76,25 Point	4.436.514.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Soreang	Nilai SAKIP	78,86 Point	5.398.402.520,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	15.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	18.000.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000,00
ordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000,00
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	- Dokumen	-	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	- Dokumen	-
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Soreang	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	- Data	-	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Soreang	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	- Data	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 Persen	3.975.314.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 Persen	4.843.982.520,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Soreang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/Bulan	3.973.314.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Soreang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	4.839.982.520,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00

Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.000.000,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Dokumen		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Dokumen	1.000.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	100 Persen	2.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	100 Persen	15.000.000,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Laporan	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Laporan	1.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	100 Persen	18.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	100 Persen	5.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Soreang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	- Unit	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Soreang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	- Unit	-
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Soreang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Soreang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	3.000.000,00

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Soreang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- orang	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Soreang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- orang	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	Kecamatan Soreang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	- orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	Kecamatan Soreang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	orang	10.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	Prosentase Ketersediaan Operasional Perkantoran	100 Persen	87.420.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Soreang	Prosentase Ketersediaan Operasional Perkantoran	100 Persen	107.420.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Soreang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Soreang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Soreang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	34.920.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Soreang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	34.920.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Soreang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Soreang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Soreang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Paket	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Soreang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.500.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Soreang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Soreang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.000.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000,00

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	20.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	40.000.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Dokumen	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Dokumen	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Soreang	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persen	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Soreang	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Soreang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Soreang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit	1.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Soreang	Prosentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	228.780.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Soreang	Prosentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	277.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	36.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	45.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	190.780.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	230.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Soreang	Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik	98,03%	110.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Soreang	Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik	98,03%	130.000.000,00

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	60.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	80.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Soreang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Soreang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Soreang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	- Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Soreang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Soreang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Soreang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	22.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Soreang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81,50 Point	65.660.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Soreang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	86,93 Point	510.000.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Soreang	Prosentase Kegiatan Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang terlaksanakan	100 Persen	14.000.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Soreang	Prosentase Kegiatan Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang terlaksanakan	100 Persen	12.500.000,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1Laporan	3.000.000,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2.500.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	11.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	10.000.000,00

Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Soreang	Prosentase Masyarakat yang mendapat pelayanan prima di kecamatan	100 Prosen	6.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Soreang	Prosentase Masyarakat yang mendapat pelayanan prima di kecamatan	100 Prosen	7.55.000,00
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	- Dokumen	-	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	2.500.000,00
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.000.000,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.500.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.500.000,00
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Soreang	Prosentase pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	20.000.000,00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Soreang	Prosentase pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	40.000.000,00
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	20.000.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	40.000.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Soreang	Prosentase Urusan Pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan	100%	25.660.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Soreang	Prosentase Urusan Pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan	100%	450.000.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7 Laporan	25.660.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7 Laporan	450.000.000,00

Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Soreang	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	86,93	22.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Soreang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	86,93	160.000.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Soreang	Prosentase Capaian keberhasilan peningkatan pemberdayaan desa		6.000.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Soreang	Prosentase Capaian keberhasilan peningkatan pemberdayaan desa		88.000.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	2.000.000,00	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan emberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	3.000.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Dokumen	2.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Dokumen	80.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Soreang	Prosentase lembaga dan usaha masyarakat yang dibina	100%	16.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Soreang	Prosentase lembaga dan usaha masyarakat yang dibina	100%	40.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00

Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	1 Unit	-
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	2.000.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	5.000.000,00
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	2.000.000,00	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	5.000.000,00
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Soreang	Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-%	-	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Soreang	Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	32.000.000,00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kecamatan Soreang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	- Keluarga	-	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	10 Keluarga	5.000.000,00
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Soreang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	- Keluarga	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10 Keluarga	5.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kecamatan Soreang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	- Keluarga	-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	10 Keluarga	5.000.000,00

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kecamatan Soreang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	- Keluarga	-	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	10 Keluarga	5.000.000,00
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Soreang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	- Keluarga	-	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10 Keluarga	7.000.000,00
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Soreang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	- Keluarga	-	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	10 Keluarga	5.000.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Soreang	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	11.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Soreang	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	60.000.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Soreang	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	5.000.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Soreang	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	45.000.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.500.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.000.000,00

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1Laporan	2.500.000,00	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1Laporan	30.000.000,00
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Soreang	Prosentase aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan	100%	6.000.000,00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Soreang	Prosentase aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan	100%	15.000.000,00
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	6.000.000,00	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	15.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Soreang	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%	22.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Soreang	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	1,00	90.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Soreang	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%	22.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Soreang	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%	90.000.000,00
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Kecamatan Soreang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	- Orang	-	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Kecamatan Soreang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	50 Orang	10.000.000,00

Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Soreang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	7.000.000,00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Soreang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	20.000.000,00
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Soreang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	40 Orang	3.000.000,00	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Soreang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	50 Orang	20.000.000,00
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1Laporan	2.000.000,00	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	- Laporan	-
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	10.000.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	40.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Soreang	Prosentase Desa yang dibina dan Diawasi	100%	88.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Soreang	Prosentase Desa yang dibina dan Diawasi	100%	110.000.000,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Soreang	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	88.000.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Soreang	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	110.000.000,00

Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0 Dokumen		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0 Dokumen	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	30.000.000,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	30.000.000,00
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	5.000.000,00
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	35.000.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	40.000.000,00
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	- Dokumen	-	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	5.000.000,00
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen	3.000.000,00	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	- Dokumen	-

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	2.500.000,00	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kecamatan Soreang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	- Dokumen	-
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.500.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Soreang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	- Laporan	
Jumlah Total				4.645.174.000,00					6.323.402.520,00

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Soreang Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra Perubahan) Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Soreang Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Soreang dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kecamatan Soreang telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan pada Tahun 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Dan berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbang tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

abel 2.9 T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Bandung

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Soreang

N o	Program/Kegiata n	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			NIHI		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SOREANG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 terdapat beberapa isu strategis, salah satunya adalah rendahnya kualitas implementasi dan belum optimalnya kualitas dan kuantitas partisipasi dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah pusat mencanangkan salah satu agenda pembangunan yaitu *Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik* untuk menyelesaikan isu strategis tersebut.

Kabupaten Bandung dalam mendukung agenda pembangunan nasional tersebut mencanangkan misi *Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan*. Pemerintah adalah salah satu aktor utama dalam pembangunan. Konsep tata kelola pemerintahan dengan prinsip *good governance* sudah sering digalakkan baik dalam skala pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam satu dekade terakhir. Dalam melengkapi konsep *good governance* yang masih terus diupayakan, penerapan konsep *dynamic governance* dirasa penting untuk diadakan. Konsep tata pemerintahan yang dinamis adalah mencoba menciptakan pemerintahan yang selalu adaptif terhadap dinamika perubahan dan tantangan yang selalu berubah setiap waktunya.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dinamis maka perlu adanya dorongan beberapa faktor yaitu meningkatnya kualitas e-government melalui peningkatan kualitas

kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik, dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, pemerintah daerah perlu menciptakan stabilitas lingkungan bermasyarakat yang religius dan kondusif dengan cara meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dorongan-dorongan terhadap beberapa faktor tersebut merupakan tugas dan fungsi kewilayahan yang dilaksanakan Kecamatan Soreang dalam lingkup wilayahnya.

Peranan Kecamatan sangat strategis dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan

kewenangan lain yang dilimpahkan, dengan menitikberatkan pada isu sentral diantaranya

Tabel 3.1
Dukungan Program Program Perangkat Daerah (Kecamatan) yang Mendukung Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Prioritas Nasional

Program Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Program Kecamatan
PN 3	SDM berkualitas dan berdaya saing	PP1	Reformasi sistem kesehatan daerah	P1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	
PN 1	Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	PP2	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	P2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	
		PP8	Gerakan membangun desa			

Program Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Program Kecamatan
PN 7	Stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik	PP7	Inovasi pelayanan publik dan penataan dearah	P3	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
PN 3	SDM berkualitas dan berdaya saing	PP5	Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan	P4	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global	
PN 4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PP9	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara			

Program Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Program Kecamatan
PN 6	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	PP6	Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana	P5	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim	
		PP10	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup			
PN 4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PP3	Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan	P6	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan ketahanan pangan	
PN 2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	PP10	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup	P7	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	
PN 5	Infrastruktur untuk ekonomi pelayanan dasar	PP9	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara			
PN 3	SDM berkualitas	PP4	Reformasi sistem	P8	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh	

Program Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Program Kecamatan
	dan berdaya saing		perlindungan social		lapisan masyarakat	
PN 2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	PP1 1	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata	P9	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah, sehingga tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat arah yang jelas dan terukur serta memberikan parameter terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan kajian-kajian yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 terdapat tantangan-tantangan dalam pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2021-2026 ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Bandung yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera.”*

Penjabaran dari visi Kabupaten Bandung 2021-2026 adalah sebagai berikut

Bangkit: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit adalah memberdayakan masyarakat menuju perubahan sosial

ekonomi secara nyata dan bertahap melalui program pembangunan yang dirancang secara sektoral dan regional yang berdampak signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya beli.

Edukatif: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Edukatif, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat dan aparatur memiliki motivasi, semangat, dan etos kerja yang prima atau Bedas di segala bidang untuk kemajuan Kabupaten Bandung.

Dinamis: Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Bandung yang Dinamis, yang dimaksud adalah terselenggaranya kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Bandung yang memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan juga diartikan sebagai: (i) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; (ii) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Agamis: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Agamis, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang masyarakatnya dan aparaturnya bersih dan berwibawa berakhlak mulia berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

Sejahtera: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Sejahtera, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang,

pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan memadai.

Berdasarkan visi pembangunan yang ada, berikut adalah misi-misi pembangunan yang ada dalam mewujudkan visi pembangunan. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

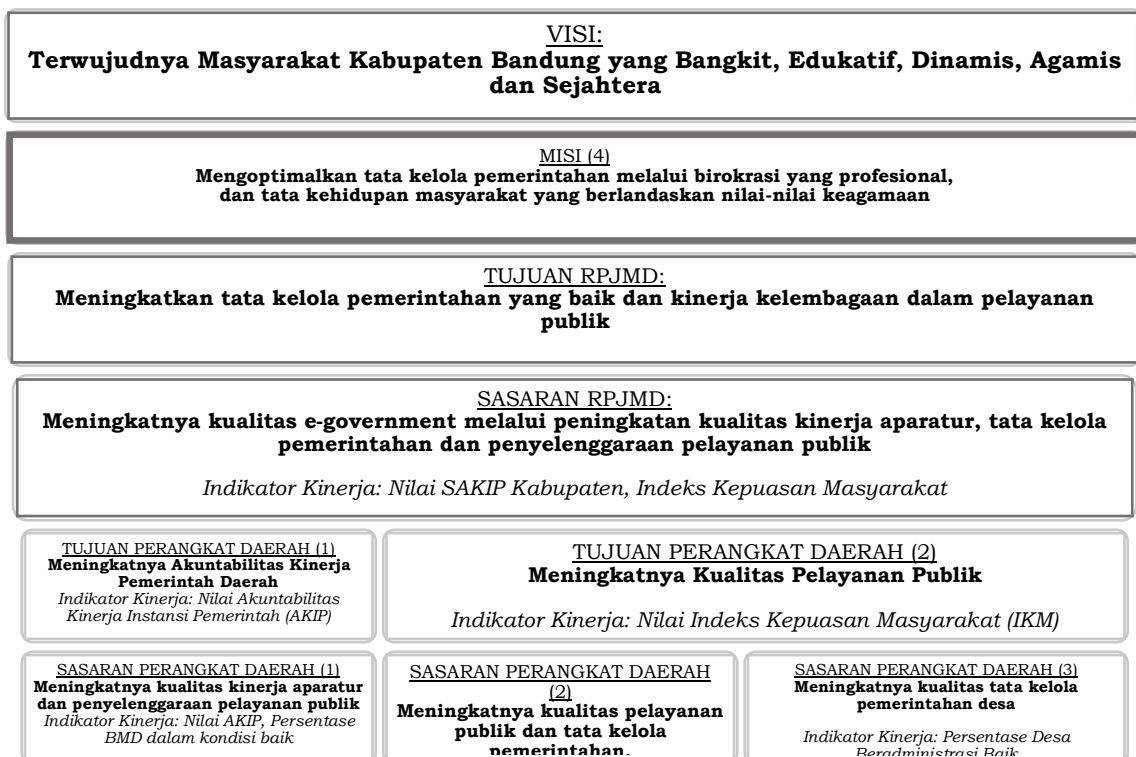
1. Membangkitkan Daya Saing Daerah.
2. Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata
3. Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreativitas dalam bingkai kearifan lokal.
4. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah.

Berdasarkan telaahan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, agar visi dan misi tersebut dapat diwujudkan serta sebagai upaya penyelesaian isu strategis yang telah dirumuskan, maka Kecamatan Soreang menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah berdasarkan pada sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada visi dan misi bupati. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kecamatan Soreang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan.

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Soreang pada periode tahun 2021 – 2026 terperinci dalam gambar dan tabel berikut ini:

Gambar 3.1
Cascading RPJMD terhadap Tujuan dan Sasaran Kecamatan Soreang



Tabel 3.2
Matriks Cascading Misi, Tujuan RPJMD, Sasaran RPJMD dan Tujuan
Kecamatan Soreang

No	MISI	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE
									1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas e-govt melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80,97 Poin	81,00 Poin	81,25 Poin	81,50 Poin	81,75 Poin	82,00 Poin	82,00 Poin

a. Tujuan

Tujuan Kecamatan Soreang pada tahun 2025 dirumuskan dengan memperhatikan Misi 4, yaitu Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai – nilai keagamaan yang diemban seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung, maka tingkat pencapaiannya dapat dilihat dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan itu sendiri. Adapun tujuannya, yaitu:

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Adapun Sasaran Renja Kecamatan Soreang Tahun 2025 adalah:

“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan “

Untuk memperjelas kerangka kerja dari tujuan dan sasaran perangkat daerah maka diperlukan penentuan indikator kinerja dari turunan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tabel 3.2 merupakan matriks indikator kinerja dari tujuan dan sasaran beserta turunannya berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Soreang pada Tahun 2025.

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025
Kecamatan Soreang

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi			
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Tersusunya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Tersusunya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Tersedianya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Tersusunya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tersedianya Dokumen Administrasi BMD yang tepat waktu	Tersusunya Dokumen Administrasi BMD yang tepat waktu	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan		
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Tersedianya dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	Tersusunya dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersusunya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersusunya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Tersusunya Laporan Pelaksaaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
	Tersedianya Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Tersusunya Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor		
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kantor yang Disediakan	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Paket Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersusunnya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tersedianya dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersusunnya dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Tersedianya Mebel	Terlaksananya Penyediaan Mebel	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
	Tersedianya laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam Kondisi Baik		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT			
	Tersedianya Dokumen koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunya Dokumen koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersusunya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tersedianya Dokumen Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan		
	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
						diWilayah Kecamatan	
	Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Tersusunnya Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan		
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas Tata Kelola pemerintahan desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			
	Tersedianya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiata n Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
	Tersedianya Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Meningkatnya lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi		
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tersusunnya Laporan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
	Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Jumlah Laporan Fasilitasi PemanfaatanTeknologi Tepat Guna	
	Tersediaanya Dokumen Laporan tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Laporan tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		
	Terlaksananya kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Tersediaanya Data kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat,			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Berbangsa, dan Bernegara			Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
	Terlaksananya kegiatan Ketahanan Pangan Keluarga	Tersusunya Laporan kegiatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Tersediaanya Laporan Data Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Tersediaanya Data Laporan tentang Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
						Hukum tentang Kepemilikan Rumah	
	Terlaksananya kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Tersedianya Laporan Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
	Terlaksananya kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Tersediaanya Laporan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	PROGRAM KOORDINASI	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	ketentraman dan ketertiban umum			
	Tersedianya Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tersusunnya Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara RepublikIndonesia	
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	
	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
						Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
6	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas Tata Kelola pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi			
	Tersedianya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang dibina		
	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tersusunya Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan PendayagunaanAs et Desa	
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Tersusunya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDes a	

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil. Program dan Kegiatan pada Kecamatan Soreang yang disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung, perencanaan program dan kegiatan ini sesuai alur atau mekanisme perencanaan mulai dari persiapan hingga penetapan skala prioritas. Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Soreang selama satu tahun ke depan tahun 2025, diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kabupaten Bandung.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, ditetapkan beberapa subkegiatan pada tahun 2025, dimana subkegiatan tersebut merupakan bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, Kecamatan Soreang menetapkan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025 yang terdiri dari 6 program, 17 kegiatan, dan 71 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 6.323.402.520,-

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi pemerintah daerah, dalam Rencana Kerja Kecamatan Soreang Tahun 2024 direalisasikan melalui program/kegiatan/subkegiatan. Adapun rencana program/kegiatan/sub kegiatan Kecamatan Soreang adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel T-C.33 sebagaimana terlampir di bawah:

Tabel 3.2 T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Soreang Tahun 2025
Dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Bandung

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2026	
				Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		8	9	11	14	15	16
		KECAMATAN SOREANG				6.323.402.520,00				6.326.902.520,00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				6.323.402.520,00				6.326.902.520,00
	7.01	KECAMATAN				6.323.402.520,00				6.326.902.520,00
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik		76.75 Poin 98,05 Persen	5.393.402.520,00			77,00 Poin	5.398.402.520,00
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi,	Kecamatan	100 Persen	18.000.000,00		Kecamatan	100 Persen	18.000.000,00
	7.01.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan	2 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	2 Dokumen	10.000.000,00
	7.01.01.2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan	2 Dokumen	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Kecamatan	2 Dokumen	3.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2026	
				Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		8	9	11	14	15	16
							ALOKASI UMUM			
	7.01.01.2.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan	2 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	2 Dokumen	1.000.000,00
	7.01.01.2.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan	1 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	1 Dokumen	1.000.000,00
	7.01.01.2.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan	1 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	1 Dokumen	1.000.000,00
	7.01.01.2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan	1 Laporan	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	1 Laporan	1.000.000,00
	7.01.01.2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan	1 Laporan	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	1 Laporan	1.000.000,00
	7.01.01.2.01.000 8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Kecamatan	0 Dokumen	0,00	-	Kecamatan		0,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2026	
				Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		8	9	11	14	15	16
			Statistik Sektoral Daerah							
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kecamatan	0 Data	0,00	-	Kecamatan		0,00
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan		100 Persen	4.843.982.520,00		Kecamatan	100 Persen	4.843.982.520,00
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan	19 Orang/bulan	4.839.982.520,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Kecamatan	21 Orang/bulan	4.839.982.520,00
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan	1 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	1 Dokumen	1.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2026	
				Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		8	9	11	14	15	16
	7.01.01.2.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Kecamatan	1 Laporan	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	1 Laporan	1.000.000,00
	7.01.01.2.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>	Kecamatan	1 Laporan	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	1 Laporan	1.000.000,00
	7.01.01.2.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	Kecamatan	1 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	1 Dokumen	1.000.000,00
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Prosentase kesesuaian barang milik daerah dalam data base</i>		100 Persen	2.000.000,00		Kecamatan	100 Persen	2.000.000,00
	7.01.01.2.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Kecamatan	1 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	1 Dokumen	1.000.000,00
	7.01.01.2.03.000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Kecamatan	1 Laporan	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	1 Laporan	1.000.000,00
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi</i>		100 Persen	14.000.000,00	100 Persen	Ke camatan	100 Persen	19.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2026	
				Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		8	9	11	14	15	16
			<i>Kepegawaian yang tepat waktu</i>							
	7.01.01.2.05.000 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	<i>Kecamatan</i>	0 Unit	0,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	1 Unit	1.000.000,00
	7.01.01.2.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Kecamatan</i>	1 Paket	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	1 Paket	3.000.000,00
	7.01.01.2.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Kecamatan</i>	1 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	0 Dokumen	1.000.000,00
	7.01.01.2.05.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	<i>Kecamatan</i>	0 Dokumen	0,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	1 Dokumen	1.000.000,00
	7.01.01.2.05.001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Kecamatan</i>	0 Orang	0,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	30 Orang	3.000.000,00
	7.01.01.2.05.001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan</i>	<i>Kecamatan</i>	21 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	30 Orang	10.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2026	
				Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		8	9	11	14	15	16
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan operasional Pelayanan Administrasi dan Umum Kantor</i>		100 Persen	107.420.000,00		Kecamatan	100 Persen	107.420.000,00
	7.01.01.2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kecamatan	5 Paket	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	4 Paket	3.000.000,00
	7.01.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kecamatan	10 Paket	34.920.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	10 Paket	34.920.000,00
	7.01.01.2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	Kecamatan	5 Paket	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	5 Paket	10.000.000,00
	7.01.01.2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kecamatan	5 Paket	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	5 Paket	1.500.000,00
	7.01.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kecamatan	5 Paket	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	5 Paket	10.000.000,00
	7.01.01.2.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan</i>	Kecamatan	1 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	1 Dokumen	1.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2026	
				Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		8	9	11	14	15	16
	7.01.01.2.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	1 Laporan	5.000.000,00
	7.01.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan	1 Laporan	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	1 Laporan	40.000.000,00
	7.01.01.2.06.001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan	1 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	1 Dokumen	1.000.000,00
	7.01.01.2.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan	1 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	1 Dokumen	1.000.000,00
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan	100 Persen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	100 Persen	1.000.000,00
	7.01.01.2.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan	1 Unit	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	1 Unit	1.000.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran		100 Persen	277.000.000,00		Kecamatan	100 Persen	277.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2026	
				Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		8	9	11	14	15	16
	7.01.01.2.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan	1 Laporan	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	1 Laporan	2.000.000,00
	7.01.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan	1 Laporan	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	1 Laporan	45.000.000,00
	7.01.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan	1 Laporan	230.000.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	1 Laporan	230.000.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	130.000.000,00		Kecamatan	100 Persen	130.000.000,00
	7.01.01.2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan	9 Unit	80.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	9 Unit	80.000.000,00
	7.01.01.2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan	5 Unit	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	5 Unit	3.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2026	
				Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		8	9	11	14	15	16
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kecamatan	1 Unit	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	1 Unit	25.000.000,00
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kecamatan	1 Unit	22.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan	1 Unit	22.000.000,00
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		81,75 Poin	510.000.000,00			81,75 Poin	508.500.000,00
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 Persen	12.500.000,00		Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	100 Persen 100 Persen	12.500.000,00
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan	1 Laporan	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	1 Laporan	2.500.000,00
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan	1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	1 Dokumen	10.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2026	
				Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		8	9	11	14	15	16
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan</i>		100 Persen	7.500.000,00		Kecamatan, Pemerintah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	100 Persen 100 Persen	6.000.000,00
	7.01.02.2.02.000 1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>	Kecamatan	1 Dokumen	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	1 Dokumen	2.500.000,00
	7.01.02.2.02.000 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	Kecamatan	1 Laporan	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	1 Laporan	2.500.000,00
	7.01.02.2.02.000 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Kecamatan	1 Laporan	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	1 Laporan	1.000.000,00
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	<i>Prosentase pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>		100 Persen	40.000.000,00		Kecamatan, Pemerintah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	100 Persen 100 Persen	40.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2026	
				Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		8	9	11	14	15	16
	7.01.02.2.03.000 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan	1 Dokumen	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintahah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	1 Dokumen	40.000.000,00
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Urusan Pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan	Kecamatan	100 Persen	450.000.000,00		Kecamatan, Pemerintahah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	100 Persen 100 Persen	450.000.000,00
	7.01.02.2.04.000 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan	1 Laporan	450.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintahah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	1 Laporan	450.000.000,00
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		81,75 Poin	160.000.000,00			81,75 Poin	160.000.000,00
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Capaian keberhasilan peningkatan pemberdayaan desa		100 Persen	88.000.000,00		Kecamatan, Pemerintahah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	100 Persen 100 Persen	88.000.000,00
	7.01.03.2.01.000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintahah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	4 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2026	
				Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		8	9	11	14	15	16
	7.01.03.2.01.000 2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan	1 Dokumen	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintahn Desa, dan Lembaga Masyarakat	1 Dokumen	3.000.000,00
	7.01.03.2.01.000 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan	1 Laporan	80.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintahn Desa, dan Lembaga Masyarakat	1 Laporan	80.000.000,00
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase capaian Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi		100 Persen	40.000.000,00		Kecamatan, Pemerintahn Desa, dan Lembaga Masyarakat	100 Persen 100 Persen	40.000.000,00
	7.01.03.2.03.000 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintahn Desa, dan Lembaga Masyarakat	1 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00
	7.01.03.2.03.000 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintahn Desa, dan Lembaga Masyarakat	1 Laporan	5.000.000,00
	7.01.03.2.03.000 5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintahn Desa, dan Lembaga Masyarakat	1 Laporan	5.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2026	
				Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		8	9	11	14	15	16
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lcapaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100 Persen 100 Persen	32.000.000,00		Kecamatan, Pemerintahah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	100 Persen 100 Persen	32.000.000,00
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kecamatan	10 Keluarga	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintahah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	10 Keluarga	5.000.000,00
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan	10 Keluarga	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintahah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	10 Keluarga	5.000.000,00
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kecamatan	10 Keluarga	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintahah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	10 Keluarga	5.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2026	
				Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		8	9	11	14	15	16
	7.01.03.2.06.000 5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kecamatan	10 Keluarga	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintahah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	10 Keluarga	5.000.000,00
	7.01.03.2.06.000 9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan	10 Keluarga	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintahah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	10 Keluarga	7.000.000,00
	7.01.03.2.06.001 2	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan	10 Keluarga	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintahah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	10 Keluarga	5.000.000,00
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		100 % 81,75 Point	60.000.000,00			100 % 82,00 Point	60.000.000,00
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum		100%	45.000.000,00		Kecamatan, Pemerintahah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	100 Persen 100 Persen	45.000.000,00
	7.01.04.2.01.000 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Kecamatan	1 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintahah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	1 Laporan	15.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2026	
				Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		8	9	11	14	15	16
		Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Vertikal di Wilayah Kecamatan							
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan	1 Laporan	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	1 Laporan	30.000.000,00
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100 Persen	15.000.000,00		Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	100 Persen 100 Persen	15.000.000,00
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan	1 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	1 Laporan	15.000.000,00
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		81,75 Poin	90.000.000,00			81,75 Poin	90.000.000,00
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 Persen	90.000.000,00		Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	100 Persen 100 Persen	90.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2026	
				Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		8	9	11	14	15	16
	7.01.05.2.01.000 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	Kecamatan	50 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	50 Orang	10.000.000,00
	7.01.05.2.01.000 2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	Kecamatan	50 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	50 Orang	20.000.000,00
	7.01.05.2.01.000 4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>	Kecamatan	50 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	50 Orang	20.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2026	
				Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		8	9	11	14	15	16
	7.01.05.2.01.000 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	<i>Kecamatan</i>	1 Dokumen	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	1 Dokumen	40.000.000,00
6,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase desa cepat berkembang</i>		25 %	110.000.000,00			25 %	110.000.000,00
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Prosentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</i>		100 Persen	110.000.000,00		Kecamatan, Pemerintah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	100 Persen	110.000.000,00
	7.01.06.2.01.000 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	<i>Kecamatan</i>	0 Dokumen	0,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	1 Dokumen	0,00
	7.01.06.2.01.000 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Kecamatan</i>	1 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	1 Dokumen	30.000.000,00
	7.01.06.2.01.000 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>Kecamatan</i>	1 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	1 Dokumen	30.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatn Penting	Prakiraan Kemajuan 2026	
				Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		8	9	11	14	15	16
	7.01.06.2.01.000 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	1 Dokumen	5.000.000,00
	7.01.06.2.01.000 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan	0 Dokumen	0,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	1 Dokumen	0,00
	7.01.06.2.01.000 9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan	1 Dokumen	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	1 Dokumen	40.000.000,00
	7.01.06.2.01.001 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	1 Dokumen	5.000.000,00
	7.01.06.2.01.001 6	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan	0 Dokumen	0,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	1 Dokumen	0,00
	7.01.06.2.01.001 8	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan	0 Laporan	0,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan, Pemerintah n Desa, dan Lembaga Masyarakat	1 Laporan	0,00
	J U M L A H					6.323.402.520,00				6.326.902.520,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

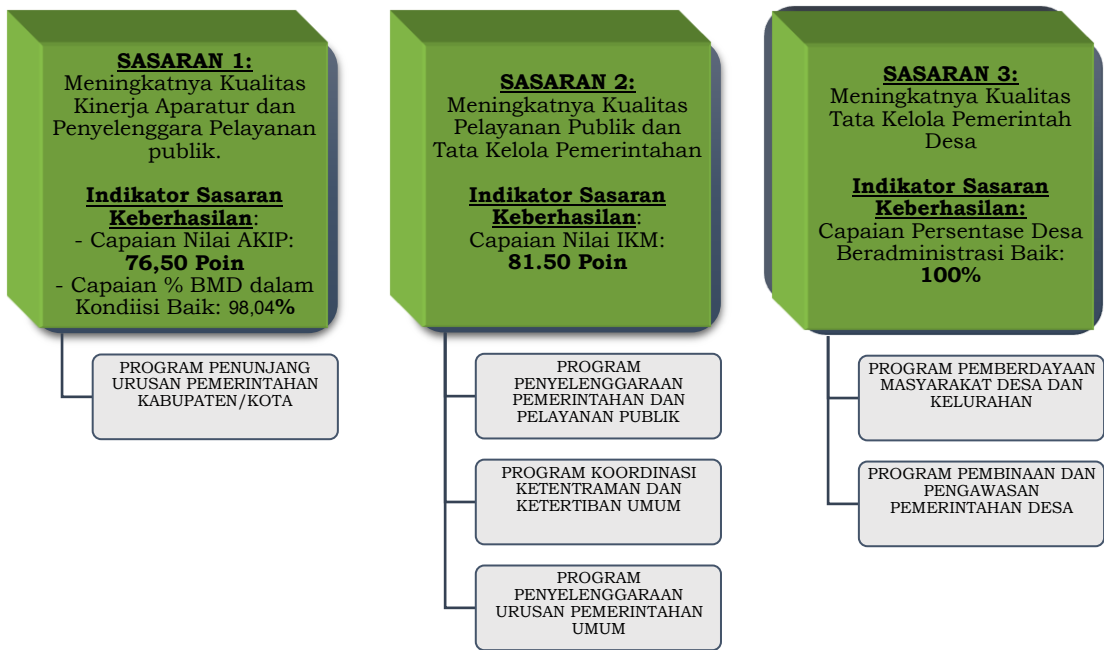
Penyusunan Rencana Kerja merupakan pengimplementasian konsep perencanaan. Pentingnya perencanaan dan peran yang dimainkannya di dalam keseluruhan proses manajerial organisasi, telah menempatkan perencanaan sebagai faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari organisasi Kecamatan Soreang. Perencanaan merupakan suatu proses yang terus menerus dengan melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi satu tahun kedepan.

Rencana Kerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Kerja Kecamatan Soreang Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025, merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung maupun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perubahan PD) Tahun 2021-2026.

Berdasarkan analisa kebutuhan, Kecamatan Soreang menetapkan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dalam usaha penyelesaian isu strategis. Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Soreang maka program dan kegiatan direncanakan untuk mendukung urusan kewilayahan yang keberhasilannya diukur dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator Sasaran.

Untuk mencapai sasaran tersebut dibutuhkan rumusan program dan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian sasaran. Sebelum menentukan besaran pagu anggaran yang dibutuhkan perlu ditentukan program apa yang dapat menyelesaikan isu yang berkaitan langsung dengan pelayanan Kecamatan Soreang dengan ukuran keberhasilan Indikator Kinerja Utama yang telah ditentukan. Berikut ini adalah penentuan rencana program yang akan dilaksanakan:

Gambar 4.1
Rencana Program yang Akan Dilaksanakan Tahun 2025



Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Soreang tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Soreang yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Soreang demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan, yang di dalamnya telah memuat Indikator kinerja dipergunakan sebagai tolok ukur pencapaiannya. Rencana Kerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025, sebagai berikut:

1.2 Pendanaan

Tabel 4.1
Perubahan Rencana Kerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Tahun Anggaran 2025
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. BANDUNG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2025												PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		JENIS KEGIATAN	PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
					KELOMPOK SASARAN		LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA	SUMBER DANA	TARGE T	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	a/b/c		
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan							
		KECAMATAN SOREANG									6.758.458.412,56	5.710.763.383,00	-1.047.695.029,56				6.326.902.520,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									6.758.458.412,56	5.710.763.383,00	-1.047.695.029,56				6.326.902.520,00			
	7.01	KECAMATAN									6.758.458.412,56	5.710.763.383,00	-1.047.695.029,56				6.326.902.520,00			
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik	Nilai Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik					76,75 98,05 Poin Persen	76,75 98,05 Poin Persen	5.803.628.612,56	4.979.593.788,00	-824.034.824,56			77,00 98,25 Poin Persen	5.398.402.520,00			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi,	Prosentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi,	Kecamatan	Aparatur Kecamatan Soreang			100 Persen	100 Persen	18.000.000,00	11.329.387,00	-6.670.613,00			100 Persen	18.000.000,00		KECAM ATAN SOREA NG	

7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	9.279.387,00	(720.613)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	10.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	1.300.000,00	(1.700.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	3.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	150.000,00	(850.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	1.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	150.000,00	(850.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	1.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	150.000,00	(850.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	1.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	150.000,00	(850.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	1.000.000,00		KECAMATAN SOREANG

	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	150.000,00	(850.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	1.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Dokumen	0,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	0 Data	0 Data	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Data	0,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan	Prosentase Capaian Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan	Kecamatan	Aparatur Kecamatan Soreang			100 Persen	100 Persen	5.229.038.412,56	4.417.876.543,00	-811.161.869,56			100 Persen	4.843.982.520,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	5.225.038.412,56	4.417.276.543,00	(807.761.870)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	19 Orang/bulan	4.839.982.520,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	150.000,00	(850.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	1.000.000,00		KECAMATAN SOREANG

	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	150.000,00	(850.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	1.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	150.000,00	(850.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	1.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	150.000,00	(850.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	1.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Prosentase kesesuaian barang milik daerah dalam data base</i>	<i>Prosentase kesesuaian barang milik daerah dalam data base</i>	Kecamatan	Aparatur Kecamatan Soreang			100 Persen	100 Persen	2.000.000,00	453.600,00	-1.546.400,00			100 Persen	2.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	303.600,00	(696.400)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	1.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	150.000,00	(850.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	1.000.000,00		KECAMATAN SOREANG

	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Kecamatan	Aparatur Kecamatan Soreang			100 Persen	100 Persen	14.000.000,00	2.889.658,00	-11.110.342,00			100 Persen	19.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Unit	1.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	2.889.658,00	(110.342)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	3.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	(1.000.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	1.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Dokumen	1.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Orang	3.000.000,00		KECAMATAN SOREANG

	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	21 Orang	21 Orang	10.000.000,00	0,00	(10.000.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21 Orang	10.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional Pelayanan Administrasi dan Umum Kantor	Persentase pemenuhan operasional Pelayanan Administrasi dan Umum Kantor	Kecamatan	Aparatur Kecamatan Soreang			100 Porsi	100 Porsi	107.420.000,00	106.256.250,00	-1.163.750,00			100 Porsi	107.420.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	5 Paket	5 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Paket	3.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	10 Paket	10 Paket	34.920.000,00	54.426.250,00	19.506.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Paket	34.920.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Paket	10.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	5 Paket	5 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Paket	1.500.000,00		KECAMATAN SOREANG

	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan	Aparatur Kecamatan Soreang			100 Persen	100 Persen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			100 Persen	1.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	1.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	Kecamatan	Aparatur Kecamatan Soreang			100 Persen	100 Persen	302.170.200,00	299.003.200,00	-3.167.000,00			100 Persen	277.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	2.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	41.833.000,00	(3.167.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	45.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	255.170.200,00	255.170.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	230.000.000,00		KECAMATAN SOREANG

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan	Aparatur Kecamatan Soreang			100 Persen	100 Persen	130.000.000,00	140.785.150,00	10.785.150,00			100 Persen	130.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	9 Unit	9 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9 Unit	80.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	5 Unit	5 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	3.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	25.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Aparatur Kecamatan Soreang	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	22.000.000,00	32.785.150,00	10.785.150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	22.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					81,75 Poin	81,75 Poin	597.874.600,00	522.221.432,00	-75.653.168,00			82 Poin	508.500.000,00		

	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat			100 Persen	100 Persen	12.500.000,00	8.300.000,00	-4.200.000,00			100 Persen	12.500.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan		2.500.000,00	2.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	2.500.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen		10.000.000,00	5.800.000,00	(4.200.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	10.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan</i>	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan</i>	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat			100 Persen	100 Persen	65.375.000,00	65.375.000,00	0,00			100 Persen	6.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen		0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	2.500.000,00		KECAMATAN SOREANG

	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>		Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	2.500.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>		Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	60.375.000,00	60.375.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENGHEMATAN BELANJA OPSIEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENGHEMATAN BELANJA OPSIEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	1.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	<i>Prosentase pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>Prosentase pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat			100 Persen	100 Persen	25.000.000,00	3.338.700,00	-21.661.300,00			100 Persen	40.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>		Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	3.338.700,00	(21.661.300)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	40.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Prosentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan</i>	<i>Prosentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan</i>	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat			100 Persen	100 Persen	494.999.600,00	445.207.732,00	-49.791.868,00			100 Persen	450.000.000,00		KECAMATAN SOREANG

	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase capaian Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi	Persentase capaian Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat			100 Persen	100 Persen	34.571.300,00	13.250.000,00	-21.321.300,00			100 Persen	40.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	24.571.300,00	3.250.000,00	(21.321.300)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	5.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	5.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lcapaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lcapaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat			100 Persen	100 Persen	24.530.000,00	21.130.000,00	-3.400.000,00			100 Persen	32.000.000,00		KECAMATAN SOREANG

7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	10 Keluarga	10 Keluarga	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Keluarga	5.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	10 Keluarga	10 Keluarga	7.555.000,00	7.555.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Keluarga	5.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	10 Keluarga	10 Keluarga	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Keluarga	5.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	10 Keluarga	10 Keluarga	5.000.000,00	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Keluarga	5.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	10 Keluarga	10 Keluarga	6.975.000,00	3.575.000,00	(3.400.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Keluarga	7.000.000,00		KECAMATAN SOREANG

	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	<i>Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat			100 Persen	100 Persen	15.000.000,00	109.463,00	-14.890.537,00			100 Persen	15.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	109.463,00	(14.890.537)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	15.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					81,75 Poin	81,75 Poin	82.591.300,00	47.300.000,00	-35.291.300,00			81,75 Poin	90.000.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat			100 Persen	100 Persen	82.591.300,00	47.300.000,00	-35.291.300,00			100 Persen	90.000.000,00		KECAMATAN SOREANG

6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa cepat berkembang / Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persentase desa cepat berkembang / Persentase desa yang dibina dan diawasi					25 %	25 %	89.230.000,00	62.448.700,00	-26.781.300,00			25 %	110.000.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Prosentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat			100 Persen	100 Persen	89.230.000,00	62.448.700,00	-26.781.300,00			100 Persen	110.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Dokumen	0,00		KECAMATAN SOREANG	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	22.300.000,00	7.698.700,00	(14.601.300)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	30.000.000,00		KECAMATAN SOREANG	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	21.930.000,00	9.750.000,00	(12.180.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	30.000.000,00		KECAMATAN SOREANG	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	5.000.000,00		KECAMATAN SOREANG	

	7.01.06.2.01.0007	Facilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>		Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Dokumen	0,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.06.2.01.0009	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>		Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	40.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.06.2.01.0012	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	<i>Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</i>		Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	5.000.000,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.06.2.01.0016	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>		Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Dokumen	0,00		KECAMATAN SOREANG
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</i>		Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Lembaga Masyarakat	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Laporan	0,00		KECAMATAN SOREANG
	J U M L A H										6.758.458.412,56	5.710.763.383,00	-1.047.695.029,56				6.326.902.520,00		

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan RKPDP Tahun 2025 yang selaras antara prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten Bandung dan Kecamatan Soreang. Untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan serta perkembangan lingkungan organisasi.

Dengan komitmen dan sinergitas aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Soreang dan pelaksanaan evaluasi serta monitoring intern secara rutin dan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang optimal dalam rangka mewujudkan target kinerja sesuai dengan target capaian kinerja dan memberikan kontribusi terhadap kinerja pencapaian visi Kabupaten Bandung.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja Renja Kecamatan Soreang Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021 – 2026, Renstra Perubahan Perubahan Kecamatan Soreang tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Selain itu, penyusunan Renja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain hal-hal diatas, penyusunan Rencana Kerja merupakan salah satu upaya proses penajaman

program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Soreang yang ditetapkan pada Peraturan Bupati Bandung nomor 75 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Soreang Tahun 2025 merupakan pedoman untuk proses penyusunan penganggaran pada tahap Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditentukan dan hasilnya akan dituangkan pada Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Soreang.

CAMAT SOREANG

Ttd

HARIS TAUPIK

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOHAMMAD DADANG SUPRIATNA